

Standar Etika Pejabat Publik

LAODE IDA

OMBUDSMAN RI

Etika, Fakta Sosial

- ▶ Aturan perilaku yang diakui dan seharusnya dilakukan seseorang;
- ▶ Terbangun dari nilai-nilai, persepsi dan atau budaya masyarakat di mana seseorang berada – sesuatu yang berasal dari luar individu;
- ▶ Standarnya (baik buruk, benar salahnya) ditentukan oleh masyarakat;
- ▶ Individu diposisikan harus tunduk atau tak berhak melawan.

Sumber Etika



Pembentukan Etika

Masyarakat –
kebiasaan dari
berbagai sumber
nilai

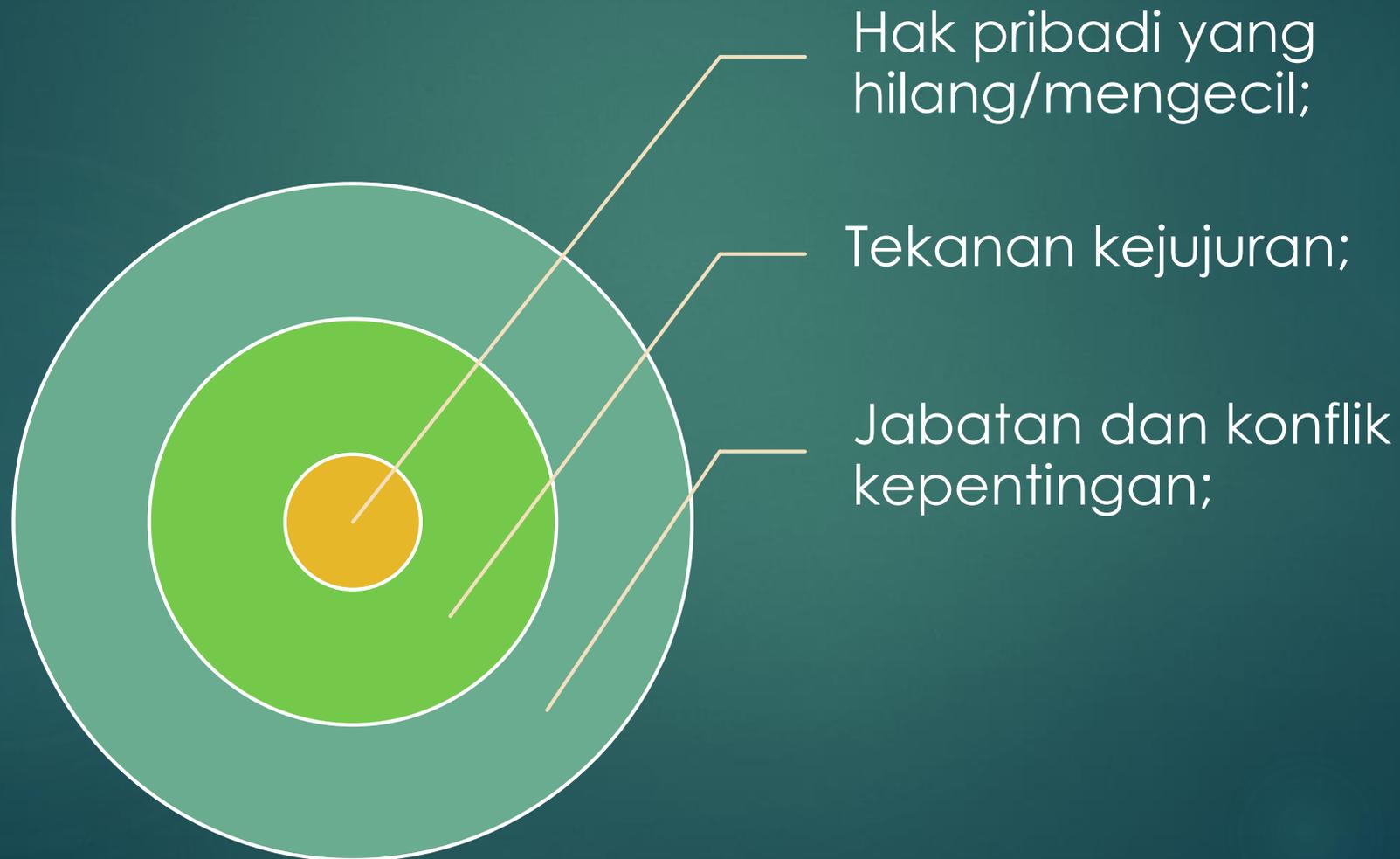
nilai-nilai (baik
buruk – produk
tafsir sosial kolektif

standar etika bagi
individu

Pejabat publik, mengapa harus patuh etika?

- ▶ Patron kolektif → musti jadi teladan untuk semua;
- ▶ Memelihara kepercayaan publik (public trust) agar jabatan lebih efektif;
- ▶ Menggunakan uang masyarakat/rakyat;
- ▶ Konsekuensi demokrasi.

Dilema Etika Pejabat Publik



Standar Etika Untuk Pejabat Publik

- ▶ Patuh pada ajaran agama;
- ▶ Patuh pada sumpah-janji;
- ▶ Patuh pada peraturan perundang-undangan;
- ▶ Perilaku sebagai patron bawahan dan masyarakat;
- ▶ Selalu bersikap dan atau berkata jujur;
- ▶ Berwatak sebagai pelayan dan penerang masyarakat;
- ▶ Bersikap sebagai integrator sosial.

Posisi Lembaga Etik

- ▶ Mencegah terjadinya pelanggaran etik bagi pejabat publik;
- ▶ Mengoreksi dan memberi sanksi terhadap pejabat pelanggar etik;
- ▶ Secara pasif dan aktif memperoleh masukan dari internal dan eksternal.

Pejabat publik tanpa kontrol etik → Ialu?

- ▶ Presiden
- ▶ Wapres
- ▶ Menteri
- ▶ Kepala daerah
- ▶ Pimpinan TNI
- ▶ Pimpinan Polri

Terima kasih

MARI DISKUSI